

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA
TOPUTO KECAMATAN PANIAI TIMUR KABUPATEN PANIAI
PROVINSI PAPUA**

Herlina Fina Tatogo
NPP: 30.1618

*Asdaf Kabupaten Paniai Provinsi Papua
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: herlinatatogoyouw@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr.Drs Andi Masrich, M.Si

ABSTRACT

Problems: Village given authority according to the needs and priorities of the village as a whole Village sources of income are used to fund all authorities to regulate and administer this authority. Paniai Regent Regulation No 19 of 2019 concerning distribution and determination of allocation of village funds for each village in Paniai. In Article 3 Paragraph 1 Where In Distribution And villages must be carried out using the principle of equal distribution each village is given the same allocation of village funds. In the management of the Village Fund Allocation (ADD) in the village of Toputo there are still several problems, one of which is the lack of equity in the distribution of allocations village funds in Toputo Village, East Paniai District, Regency Paniai. **Purpose:** This study analyzes how the Village Fund Allocation policy for determine the extent of the success of the implementation of the Allocation of Funds The village is measured by 4 variable models based on Edward III theory indicators namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This policy aims to enable ADD to be used properly and correctly in accordance with the needs of the village community. **Method:** This study uses types descriptive qualitative research method by conducting interviews with informants in the village of Toputo, East Paniai District, Paniai Regency. **Result:** The results of this study on the indicators Communication is an important part to assess successful implementation of a policy. Because communication will influence the acceptance of the executor. Second Resources, iedesignate each policy to be supported by adequate resources, both human resources and resources financial power. All three Dispositions show inherent characteristics closely to policy/program implementers. The most important character possessed by the implementor are honesty, commitment and democracy and that Finally, the bureaucracy acts as the executor of a policy must be able to support policies that have been decided politically with good coordination. **Conclusion:** Management of Village Fund Allocation (ADD) has been running according to the applicable policies, but the achievement targets have not been achieved because village officials in Toputo village still have a lack of human resources, there is still a lack of community participation in carry out the planning process. However, there are supporting factors that support the management of ADD in the village of Toputo, East Paniai District, Paniai Regency.

Keywords: Policy Implementation, Allocation of Village Funds

ABSTRAK

Permasalahan: Desa diberikan kewenangan sesuai kebutuhan dan prioritas desa, secara keseluruhan sumber pendapat desa digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kewenangan tersebut. Peraturan Bupati Paniai No 19 Tahun 2019 tentang pembagian dan penetapan alokasi dana desa untuk setiap kampung di paniai. Dalam Pasal 3 Ayat 1 Dimana Dalam Pembagian Dan Desa Harus Dilakukan menggunakan asas merata dimana setiap kampung diberikan alokasi dana desa yang sama. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Toputo masih terdapat beberapa permasalahan salah satunya Masih kurangnya pemerataan dalam penyaluran alokasi dana desa di desa toputo kecamatan paniai timur kabupaten paniai. **Tujuan:** Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan Alokasi Dana Desa untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari implementasi Alokasi Dana Desa tersebut diukur dengan 4 model variabel yang didasari pada indikator teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kebijakan ini bertujuan agar (ADD) bisa digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. **Metode:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif metode deskriptif dengan melakukan wawancara terhadap informan di desa Toputo distrik Paniai Timur Kabupaten Paniai. **Hasil Temuan:** Hasil dari penelitian ini pada indikator Komunikasi merupakan bagian penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Karena komunikasi akan memberikan pengaruh terhadap penerimaan dari pelaksana. Kedua Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Ketiga Disposisi menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis dan yang terakhir Birokrasi yang bertindak sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik. **Kesimpulan:** Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah berjalan sesuai kebijakan yang berlaku, namun target pencapaian masih belum tercapai sebab aparat desa di desa Toputo masih terdapat kekurangan SDM, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan. Namun terdapat faktor pendukung yang menunjang pengelolaan ADD tersebut di desa Toputo Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai. **Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, mewujudkan kemandirian daerah dan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian daerah didasarkan pada penguatan peluang lokal, dimana kemandirian ini harus datang dari tingkat administrasi paling bawah yaitu desa. Anggaran pembangunan dimasukkan dalam APBD khusus untuk pembangunan pedesaan, berupa Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan ke desa oleh pemerintah Kabupaten Paniai, yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Dengan alokasi dana desa sebagai sumber pendapatan kota diharapkan mampu membiayai berbagai proyek pembangunan di kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan peraturan Bupati Paniai No 19 Tahun 2019 tentang pembagian dan penetapan alokasi dana desa untuk setiap kampung di paniai. Dalam Pasal 3 Ayat 1 Dimana Dalam Pembagian Dan Desa Harus Dilakukan menggunakan asas merata dimana setiap kampung diberikan alokasi dana desa yang sama. Dalam praktiknya implementasi kebijakan yang terjadi di kabupaten Paniai belum mencapai tujuan yang sesuai. Kabupaten Paniai merupakan salah satu kabupaten di provinsi papua Tengah. Kabupaten Paniai yang terdiri atas 23 distrik, 5 kelurahan dan 216 kampung dengan jumlah penduduk 117.047 jiwa. Desa Toputo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Paniai Timur.

Berdasarkan peraturan yang ada, permasalahan kebijakan alokasi dana desa yang telah teruji coba di Desa Toputo Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai adalah alokasi dana desa dapat dikelola baik oleh pemerintah desa maupun organisasi masyarakat desa. dalam perencanaan dan pengendalian operasi yang belum baik. Tidak diikutsertakannya seluruh komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan ADD. Perencanaan ADD dan pengalokasiannya sebagian besar dilakukan oleh kepala desa dan bendahara umum desa saja, belum melibatkan aspirasi masyarakat seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 19 Tahun 2019.

Selain itu, ada indikasi kurangnya sosialisasi kebijakan ADD sampai tingkat pelaksana di desa. Sosialisasi Kebijakan ADD telah disampaikan kepada Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Tingkat Desa. Namun, sosialisasi hanya dihadiri oleh perwakilan Tim Pelaksana Tingkat Desa sehingga ada kemungkinan terjadi bias dalam pemahaman ketika kebijakan harus diimplementasikan di Desa.

Kemudian Sering terjadi keterlambatan penyusunan dokumen laporan pertanggungjawaban yang mengakibatkan terlambatnya pencairan (ADD) tahap selanjutnya. Permasalahan selanjutnya adalah rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan Alokasi Dana Desa yang diterima. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Alokasi Dana Desa ADD sudah semestinya dilakukan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Penganggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Paniai khusus di desa Toputo dapat dikatakan belum efektif dan tidak maksimal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di desa Toputo oleh aparat desa seperti pada penjelasan ini antara lain:

1. Pemilihan kepala desa yang tidak berdasarkan prosedur yang benar.
2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pelaporan alokasi dana desa di Desa Toputo Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai.
3. Masih kurangnya pemerataan dalam penyaluran alokasi dana desa di desa toputo kecamatan paniai timur kabupaten Paniai.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk menganalisis secara mendalam bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Toputo Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai Provinsi Papua. Dalam implementasi kebijakan publik, satu hal yang paling penting adalah implementasi kebijakan harus dapat menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri.

1.3 Penelitian Terdahulu

(Adi Supraja, 2017). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor. Metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintahan Desa Sukamahi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi alokasi dana desa pada pemerintahan Desa Sukamahi Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor dilakukan melalui tahap implementasi dan evaluasi.

(Unjirin, 2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Pemerintah Desa Lido Kabupaten Bima. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk implementasi penggunaan dana desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima. Hasil

penelitian ditemukan bahwa implementasi penggunaan anggaran dana desa di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima memiliki anggaran dana desa sebesar Rp. 378.000.000 dan menyerap anggaran tersebut sebesar Rp. 368.000.000 anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan perjalanan Dinas Aparatur Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima.

(Isra Wati, 2020). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan dan Mencegah Kesenjangan Sosial (Studi Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan alokasi dana desa rembitan kecamatan pujut kabupaten Lombok tengah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Rembitan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan cukup berjalan dengan baik.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Perbedaan dengan penelitian ini, mengambil Judul: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Toputo Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai Provinsi Papua. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni dalam penelitian ini akan mengalisis bagaimana kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Toputo telah berjalan searah dengan kebijakan dan peraturan yang ada, didasarkan dengan permasalahan yang ada di desa Toputo kabupaten Paniai. Sehingga akan berfokus pada kebijakan yang telah dilakukan di desa Toputo dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.5 Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan yang telah ditetapkan dan dijalankan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh aparat desa di desa Toputo Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai.

II. METODE

Pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan jenis Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Suatu penelitian memerlukan penyelidikan dalam pemecahan masalah dan menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan apa yang ingin diteliti. Bogdan & Biklen (1992: 21) mengemukakan pendapat bahwa penelitian kualitatif adalah langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau ucapan, serta perilaku orang yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif ini juga di harapkan mampu mengungkapkan situasi serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa dimana permasalahan pada penelitian kualitatif masih bersifat tentatif dan akan dikembangkan serta diubah sesudah peneliti berada di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara semi terstruktur, maksudnya sudah menyiapkan pedoman wawancara yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan wawancara. Dan dokumentasi, dokumentasi memiliki keunggulan karena relatif murah, hemat waktu dan energi. Menggunakan proses analisis data interaktif, analisis data dengan proses yang dilakukan antar komponen, dalam bentuk siklus. Pada tahapan analisis data, peneliti akan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan mengenai bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Toputo Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Alokasi Dana Desa

Penulis akan mendeskripsikan dan melihat bagaimana implementasi dari kebijakan alokasi dana desa pada Desa Toputo Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai Provinsi Papua. Menggunakan pengukur kriteria implementasi indikator teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

A. Transmisi

Dalam menyampaikan kebijakan, pemerintah atau pembentuk kebijakan harus menyadari adanya suatu keputusan yang sudah dibentuk dan dikeluarkan Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis menyimpulkan, transmisi didesa toputo masih belum maksimal pada aktivitas implemementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Toputo menunjukkan bahwa pelaku kebijakan menyampaikan informasi terkait alokasi dana desa. Namun yang menerima musyawarah terkait alokasi dana desa di desa toputo belum lengkap atau masih kurang.

B. Kejelasan

kejelasan diartikan bagaimana pejabat pelaksana program menjelaskan terkait maksud dan tujuan dari kebijakan yang sudah dirumuskan. Informasi yang diterimadapat disimpulkan bahwa sekretaris Desa Toputo tidak mengalami kesulitan namun pada tataran administrasi pertanggung jawaban keuangan masih mengalami kendala. Sehingga pertanggung jawaban keuangan kepada pemerintah daerah masih memiliki kendala. Dan menimbulkan keterlambatan.

C. Konsistensi

Konsistensi penyampaian informasi kebijakan, berdampak pada jalannya kebijakan alokasi dana desa. Di desa Toputo dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi, artinya tidak ada pesan yang saling bertentangan dari kecamatan ke Pemerintah Desa Toputo.

2. Sumber daya

A. Staf

Staf adalah sumber daya Manusia yang memiliki peran sebuah organisasi yang mendukung fungsi operasional atau administratif dan tugas-tugas lainnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh mengenai sumber daya manusia di Desa Toputo oleh aparat Desa sebagai pelaksana kebijakan (ADD) dibidang pendidikan memang rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, namun demikian mereka mempunyai kemampuan untuk mendorong masyarakat.

B. Informasi

Implementor atau pelaksana dari suatu kebijakan haruslah mengetahui apa dan bagaimana terkait hal yang akan mereka lakukan. Informasi menjadi salah satu sumber daya yang penting dalam suatu kebijakan, dimana dalam sebuah informasi memuat pesan yang akan diolah dalam pelaksanaan pelayanan kebijakan. Berdasarkan hasil observasi di atas, informasimaupun data dalam (ADD) berjalan sesuai standar operasional yang sudah prosedur dengan baik.

C. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung kebijakan (ADD) berupa Pendapatan desa, namun demikian hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung,

meja, kursi dan ATK. Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan (ADD) melalui tenaga dan material.

D. Kewenangan

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis dapat mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Toputo sudah memenuhi dimensi Sumber Daya menurut perspektif teori Edward III. Karena dari subfactor informasi, fasilitas, dan kewenangan sudah berjalan dengan cukup baik. Namun perlu adanya penambahan pada staff yang mamiliki ijazah sarjana atau staf yang sekolah ahkir di kulia. maupun tenaga ahli yang berfungsi sebagai tim teknis untuk melakukan tinjau lapangan dalam mengecek kesesuaian dokumen dan membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan. Agar tugas dan fungsi tidak tertumpu pada satu orang saja.

3. Disposisi

Disposisi merupakan faktor yang memiliki konsekuensi penting bagi pelaksana kebijakan, agar kebijakan dapat terlaksana sesuai dengan yang sesungguhnya yang diharapkan oleh pelaku kebijakan. Berkaitan dengan disposisi terkait Implementasi alokasi dana desa di desa Toputo kecamatan paniai timur kabupaten paniai yaitu:

1. Sikap pelaku saat melaksanakan kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Toputo Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai.
2. Umpan balik pelaksana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Toputo Kacamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai.
3. Terpadu kabijakan alokasi dana desa.

4. Struktur Birokrasi

Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting berkaitan dengan struktur birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi.

A. SOP (Standar Operasional Prosedur)

SOP merupakan prosedur yang sudah ditentukan dalam melaksanakan kegiatan dan dijalankan oleh pelaksana kebijakan. Dari informasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa, pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis (ADD) yang dikeluarkan oleh Bupati. Dan perlu diketahui bahwa dalam pelayanan yang tidak tepat waktu akan berpengaruh terhadap nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Adanya standar dalam melakukan pelayanan mendorong pelaksana kebijakan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

B. Fragmentasi

Dalam pelaksanaan kebijakan, penyebaran tanggung jawab atau fregmentasi yang jelas dan sistematis diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Toputo dapat memenuhi dimensi struktur birokrasi menurut perspektif Teori Edward III. Implementasi kebijakan (ADD) di desa toputo memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berjalan dengan baik serta adanya fragmentasi yang jelas dalam penyebaran tanggung jawab terhadap pelayanan kebijakan (ADD).

3.2 Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Pada Pemerintah Desa Toputo.

1. Masih adanya pengelolaan dana desa yang belum sesuai dengan peraturan bupati paniai.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi alokasi dana desa.
3. Keterlambatan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban (SPJ) desa toputo.
4. Pemeilihan kepala desa tidak sesuai prosedur atau pemeilihan secara noken

3.3 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Toputo.

Penulis menemukan beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan implementasi alokasi dana desa di desa toputo antara lain:

1. Peraturan Bupati (PERBUP) Tahun 2019 Nomor 19 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kampung Di Kabupaten Paniai.
2. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memfasilitasi kebutuhan kantor desa.

3.4 Diskusi Temuan Utama

Perbandingan antara penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Toputo yang dimana terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya perencanaan Alokasi Dana Desa oleh aparat desa yang kemudian terdapat faktor pendukung yang menunjang pengelolaan Alokasi Dana Desa seperti turut serta masyarakat dalam memfasilitasi kantor desa. Sehingga hasil Temuan terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya.

Kemudian pada penelitian ini mengenai implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2019 Nomor 19 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kampung Di Kabupaten Paniai. Yang telah sejalan dengan peraturan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh aparat desa di desa Toputo.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Terdapat peningkatan yang signifikan dalam partisipasi masyarakat desa Toputo Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa, sebab dalam perencanaan Alokasi Dana Desa membuat aspirasi masyarakat. Sehingga implementasi kebijakan semakin jelas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Toputo.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan, Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Toputo Kecamatan Paniai timur Demikian Pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap perencanaan alokasi dana desa di Desa Toputo Kecamatan Paniai timur Kabupaten Paniai oleh aparat pemerintah Desa Toputo terlihat sudah berjalan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan proses perencanaan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa Toputo tidak bersifat transparan, akses informasi antara pemerintah desa dan masyarakat bersifat kurang terbuka. Namun dari sisi perencanaan partisipasi masyarakat masih sudah mulai meningkat, ketidak sesuaian persis berdasarkan aturan.

Pada tahap pertanggungjawaban pelaporan dana desa, pemerintah desa Toputo Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai. Dalam hal ini bendahara Desa Toputo belum mampu mengelolah keuangan. Hal ini ditandai dengan kurangnya SDM aparat desa dalam pengelolaan keuangan dan kurangnya pemahaman dalam Menyusun SPJ.

Selanjutnya Kemampuan aparat Desa Toputo dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam tahap pengawasan alokasi dana desa di desa Toputo Kecamatan Paniai Timur Kabupaten Paniai oleh aparat pemerintah Desa Toputo bahwa kurangnya pengawasan kepala desa yang mengakibatkan keterlambatan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa, juga kurangnya partisipasi kepala desa dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja aparat Desa Toputo dalam membuat laporan pertanggungjawaban alokasi dana desa.

Keterbatasan Penelitian. Penulis mengalami kendala pada saat pelaksanaan penelitian di desa Toputo seperti karena kondisi yang tidak kondusif di desa Toputo sehingga sering tidak hadir ke kantor kemudian dalam penulisan Skripsi masih terdapat banyak kesalahan penulisan yang kemudian penulis memperbaikinya sesuai pedoman penulisan.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Secara sadar penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini, maka dari itu dengan segala hormat dan untuk kepentingan kita bersama penulis menyarankan untuk teman-teman yang ingin melakukan penelitian agar dapat melakukan penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu tentang Implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Toputo Kecamatan Paniai Timur kabupaten Paniai guna melengkapi dan lebih mendalami lagi penelitian selanjutnya.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada pemerintah kabupaten Paniai serta kepala desa Bapak Lukas Yogi yang telah membantu penulis memberikan informasi yang dibutuhkan dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data terkait implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Toputo kabupaten Paniai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George C. (2008) *Government in America: people, politics, and policy*. Perpustakaan Nasional RI
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supraja, A. (2017). *Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor (tinjauan sistem ketatanegaraan Islam)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- UNJIRIN, U. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Lido Kecamatan Belo Kabupaten Bima)* (Doctoral dissertation, Univer Muhammadiyah Mataram).
- ISRA, W. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN MENCEGAH KESENJANGAN SOSIAL (Studi Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah)* (Doctoral dissertation Universitas Muhammadiyah Mataram).